

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku:

- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya.
- Adi Sulistyono. 2007. "Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030". Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- David Arellano Gault. 2017. "*Corruption as an organizational process: Understanding the logic of the denormalization of corruption*", *Contaduría y Administración*. Vol. 62 No. 828.
- Edi Suharto, 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Emerson Yuntho, 2011, Indonesia Corruption Wach, Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Bandung, Rieneka Cipta.
- Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal (Edisi Terjemah Oleh Noor Cholis). Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Giorgio Locatelli,dkk. 2017. "*Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room*", *International Journal of Project Management*. Vol. 35 No. 252.
- H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Perss.
- Ichsan Malik, 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Jakarta: Buku Kompas.
- Listyo Yuwanto. 2015. "Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values, Integritas. Vol. I No. 1.
- Mansour, fakih, 2006, Masyarakat Sipil untuk Tranformasi Social Pergolakan Ideology LSM Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samuel Mangapul Tampubolon. 2014. "Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004", *Lex et Societatis*. Vol. II No. 6.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Sukanto Marmosudjono, 2009. Penegakan Hkum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Suraji. 2008. "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 12 No. 2.
- Suwarsono Muhammad. 2016. Anti Korupsi: Teori dan Strategi Grup Bisnis, Makelar Kasus, dan KPK. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN.
- Syed Hussain Alatas. 2007. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta: LP3ES.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi). Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusuf Kurniadi, dkk. 2011. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- ([https:// acch. kpk. go. id/ id/ statistik/ tindak- pidana- korupsi/](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/) diakses pada tanggal 1 April 2018).
- (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/09112861/calon-kepala-daerah-yang-jadi-tersangka-korupsi-tidak-bisa-mengundurkan-diri/> diakses pada tanggal 1 April 2018).
- (<https://news.detik.com/berita/2586880/ini-visi-misi-jokowi-jusuf-kalla/> diakses pada tanggal 1 April 2018).
- (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4177-kpk-tahan-empat-tersangkasuap-hakim-pn-tangerang/> diakses pada tanggal 1 April 2018).
- (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4183-kasus-suap-pembahasan-apbpd-malang-kpk-tetapkan-19-tersangka/> diakses pada tanggal 1 April 2018).

II. Lain-lain:

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.